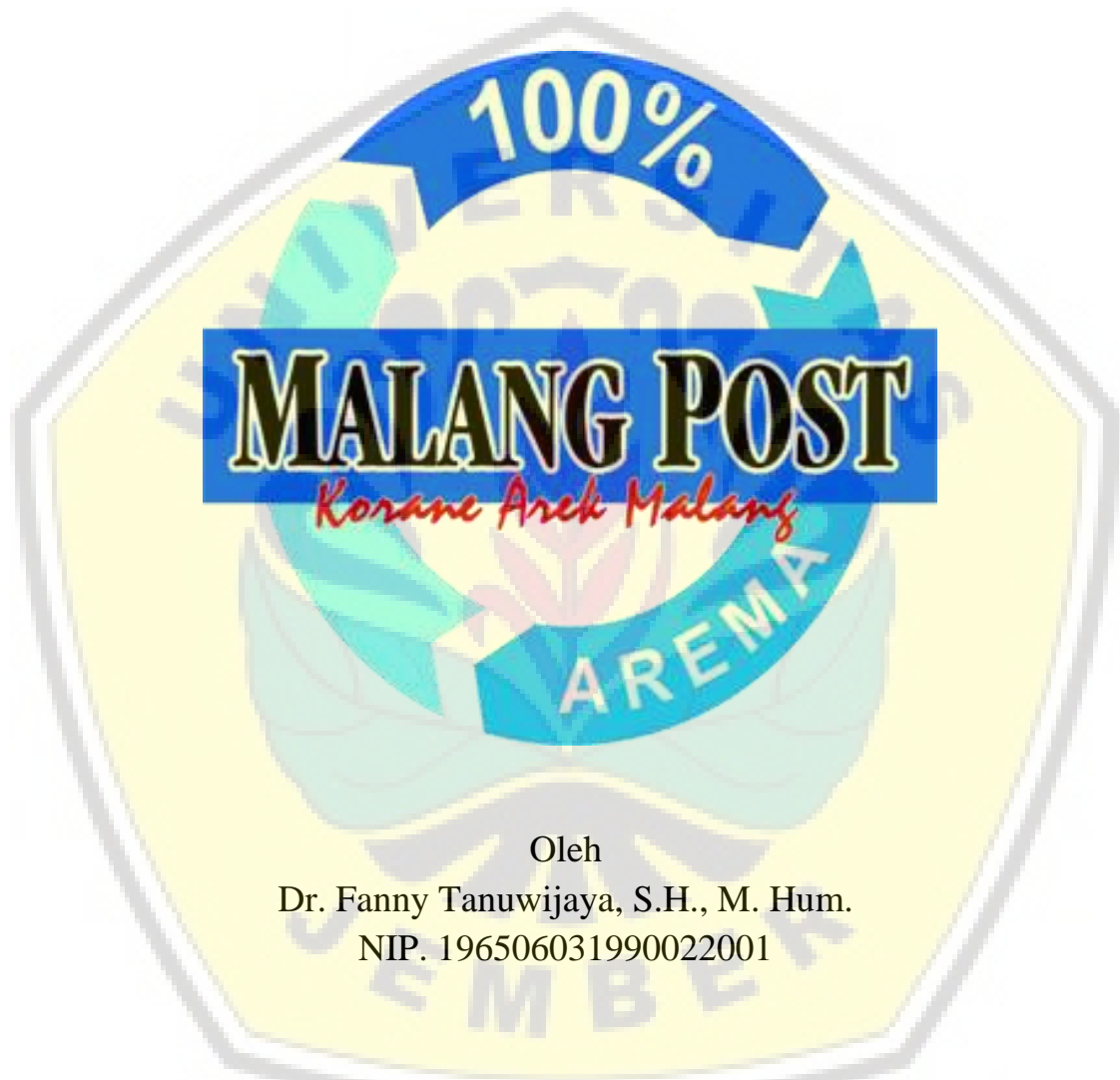


PUBLIKASI ILMIAH
KORAN

MEMBACA PROGRESIFITAS MUSLIHAT KORUPTOR



Oleh
Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.
NIP. 196506031990022001

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM



2019



Membaca Progresifitas Muslihat Koruptor

Published on Wednesday, 20 March 2019 21:42



Oleh Fanny Tentuwijaya,
doktor Ilmu Hukum, penulis buku, dan Pengajar Universitas Jember

Saat dihadapkan dengan seseorang berlabel tokoh ditangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan melakukan korupsi atau penyalahgunaan jabatan, pertanyaan logis yang muncul masih berapa lagi "kandidat" yang melakukan muslihat kekuasaan yang berakhir sama? Mahatma Gendi pernah berpesan, "You may never know what results come of your action, but if you do nothing there will be no, atau Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang Anda lakukan, tetapi jika Anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak mungkin mendapatkan hasil." Pesan tokoh reformasi itu sebenarnya mengingatkan pada setiap orang supaya dalam hidup ini, manusia tidak suka menyerah dalam menjawab tantangan.

Revitalisasi Pendidikan Karakter dalam Menjawab Krisis Moral

Published on Tuesday, 19 March 2019 21:24



Oleh Melani Risdiana, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang

Karakter bangsa merupakan aspek penting dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menentukan nasib bangsa itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan pendidikan karakter juga diperlukan adanya revitalisasi. Revitalisasi pendidikan karakter perlu dilakukan karena peran pendidikan memiliki pengaruh besar dalam kemajuan bangsa. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dalam menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya taberdaya. Sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Menurut Dr. Martin Luther King, "kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir dan pendidikan yang sebenarnya." Melalui pendidikan, seseorang akan belajar menjadi seorang yang berkarakter dan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni.

More Articles...

- Debat Ketiga Pilpres 'Guru adalah Kunci Pendidikan
- Singkaran Kultur "Dusta" Diantara Kita
- Korban Bencana, Siapa Bertanggung Jawab?
- Dehumanisasi Umat Beragama
- Tertipu Clickbat

Google Penelusuran Khusus

Baca Juga



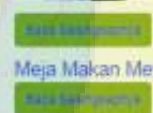
Qualcomm, Siapkan Smartphone Kamera 100 MP



Enaknya Dawet Pak Koentjoeng



Obituari Ludfi Firmansyah, Garda Depan Bisnis Kora...



Meja Makan Mewah, Harga Terjangkau

Our Services :

Internet Service





Membaca Progresifitas Muslihat Koruptor

Published on Wednesday, 20 March 2019 21:42

Page 1 of 2



Oleh Fanny Tanuwijaya,
dokter Ilmu Hukum, penulis buku, dan Pengajar Universitas Jember

Saat dihadapkan dengan seseorang berlabel tokoh ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan melakukan korupsi atau penyalahgunaan jabatan, pertanyaan logis yang mencuat masih berapa lagi "kandidat" yang melakukan muslihat kekuasaan yang berakhir sama? Mahatma Gandhi pernah berpesan, "You may never know what results come of your action, but if you do nothing there will be no, atau Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang Anda lakukan, tetapi jika Anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak mungkin mendapatkan hasil."

Pesan tokoh reformasi itu sebenarnya mengingatkan pada setiap orang supaya dalam hidup ini, manusia tidak suka menyerah dalam menjawab tantangan.

Sebaliknya, berusaha menunjukkan kemampuan dirinya untuk melahirkan sejarah, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat dan bangsanya.

Kata kunci yang disampaikan Gandhi tersebut terletak pada "usaha" atau pewujudan "kinerja". Keduanya mengajak setiap elemen masyarakat, apalagi yang jelas-jelas mempunyai kapabilitas moral, agama, skill, atau keistimewaan lainnya demi terjadinya perubahan besar, khususnya perubahan dari kondisi yang membebani masyarakat menjadi atmosfer yang mencerahkan atau membeningkan masyarakat.

Dalam rangka menyikapi kemungkinan adanya sejumlah temuan KPK di masa mendatang, maka selayaknya sejak dini tema gerakan adalah kata "usaha" maksimal, khususnya usaha dari kalangan elit strategis bangsa untuk membaca setiap kemungkinan muslihat pengembalian kekuasaan.

Setiap elemen negara boleh saja mengaktifkan diri dalam diskursus secara teoritis tentang makna penyalahgunaan kekuasaan (abus of power) atau penyelingkuhan jabatan dan unsur-unsurnya, serta sifat-sifat korupsi, akan tetapi ranah das sollen gerakan menghabisi setiap jengkal muslihat koruptor wajib digelorakan atau yang diperlukan dalam ranah das sein adalah gerakan berkelanjutan dan militant untuk menutup setiap ruang memungkinkan digunakan korupsi.

Masalahnya, benarkah kita ini sungguh-sungguh menjadikan penyalahgunaan kekuasaan atau praktik malapraktik jabatan sebagai musuh utama? Tidakkah penyimpangan kekuasaan masih kita jadikan sebagai "sahabat" setia untuk memperkaya diri atau membesarkan pundit-pundi kekayaan?

Gugatan tersebut berangkat dari gampangya ditemukan sejumlah sifat, pola, atau modus operandi penyelingkuhan kekuasaan. Nyaris sudah atau sedang terjadi pemerataan perburuan keuangan Negara secara nir yuridis dan amoral.

Pengelola kekuasaan yang dipercaya mengelola keuangan di lembaga-lembaga ini, bukannya mengamankan dan "menyamankan" (menormalisasikan) penggunaan keuangan negara, tetapi justru disalahalamatkan penggunaannya.



Membaca Progresifitas Muslihat Koruptor

Published on Wednesday, 20 March 2019 21:42

Page 2 of 2

Misalnya ranah pengadaan barang menjadi sumber korupsi, pasalnya 70 persen kasus yang ada di KPK berelasi pengadaan barang dan jasa. Pelaku korupsi di sektor pengadaan barang ini mulai dari 'orang kecil' (pegawai rendahan) sampai 'jempolan' (pejabat pemerintah). Besarnya angka korupsi ini tak bisa disangkal jika dikaitkan dengan besarnya anggaran negara untuk pengadaan barang. Sebut misalnya Perusahaan Listrik Negara saja, nilai pengadaan mencapai Rp150 triliun, sedangkan pada institusi BP Migas jumlahnya tidak kurang dari US\$9-12 miliar. Berpijak data tersebut, setidaknya bisa dipahami, bahwa elemen strategis structural atau pemangku jabatan menjadi mudah tergoda melakukan penyimpangan anggaran (keuangan) negara akibat besar kecilnya pengelolaan uang yang dipercayakan padanya dan rendahnya komitmen moral dalam menjaga sakralitas jabatannya. Bukannya amanat ini dijadikan momentum untuk melawan kecenderungan menyalahgunakannya, sebaliknya diperlakukan sebagai momentum "berusaha" secara maksimal guna mengalirkannya pada kantong pribadi, keluarga, dan kroni. Mereka itu tergelincir pada "usaha" meminimalisir atau bahkan menegasikan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan publik atau mewujudkan program-program pembangunan riil berbasis humanitas-kerakyatan, sementara "usaha" yang mengarah dan membenarkan penyalahgunaan anggaran diberi ruang lebih liberal dan absolut. Itu menunjukkan, kalau para penyelengkuh kekuasaan ini tidak pernah kehilangan muslihatnya dalam mengaplikasikan cara individual, terkultur dan terstruktur yang dinilainya cukup ampuh dalam memproduksi ruang yang sangat longgar untuk menjarah atau menyalahalamatkan keuangan negara. Penerapan muslihat yang bermodus terkultur dan terstruktur merupakan bagian dari strategi besar oknum-oknum koruptor dalam mematahkan atau mengimpotensikan setiap gerakan (usaha) komunitas pejuang anti korupsi. Mereka yang sudah terbiasa hidup dalam bingkai muslihat korupsi, tentulah tidak menginginkan "kejayaan dan kekayaan" dari korupsi mereka. Kesadaran moral dan kecerdasan intelektualitas pejuang anti korupsi menjadi modal utama mengalahkan setiap orang atau kelompok (sindikat) penyalahguna kekuasaan. Kesadaran moral bisa ditunjukkan dalam bentuk penguatan diri setiap pejuang untuk tidak tergoda, apalagi sampai terjerumus dalam lingkaran setan politik dan ekonomi yang dikonstruksi para koruptor. Koruptor wajib diyakini oleh setiap pejuang anti korupsi, bahwa mereka mempunyai ideologi dan jaringan terorganisir yang mampu menciptakan warna institusi dari yang putih menjadi hitam-kelam, atau membuat institusi penegak hukum mengidap impotensi totalitasnya. Sementara disisi lain, kecerdasan intelektualitas dibutuhkan oleh para pejuang anti korupsi untuk membaca akselerasi dan kelicinan setiap elemen oknum kekuasaan atau para penjahat krah puith yang menggunakan kekayaan negara sebagai obyek eksperimentasi penyimpangan secara berlanjut dan masif. Pengawinan atau penyatuan kesadaran moral dan kecerdasan intelektualitas itu merupakan kunci utama yang melapisi kinerja (usaha) setiap pejuang anti korupsi. Kalau ini bisa diwujudkan, setidaknya lingkaran deviatif yang sudah laten yang selama ini dibangun dan berusaha dimapankan oleh koruptor, menjadi ada jalan untuk dilakukan dekonstruksi. Kekuatan koruptor tidak akan terus mengembangkan atau meluaskan sayap kriminalisasi jika kapasitas pejuang yang melakukan perlawanan terus menyala untuk membaca setiap muslihatnya (koruptor).